

UPAYA SINKRONISASI RENCANA PENARIKAN DANA DENGAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Dewi Arum Rahayuningsih¹, Meidi Syaflan²

STIE Widya Wiwaha, Yogyakarta

arumdewisgk@gmail.com

Abstract. *The study aims to identify the cause of the deviation of the indicator value on page III of the DIPA and to formulate an effort to prevent the occurrence of deviation values in the Wates Veterinary Chamber. The method used is qualitative with a case study approach. The instrument in the interview method is the guidelines for structured interviews. Data is collected through interviews and observations, then analyzed in reduction, displayed, and drawn conclusions. The results of the research showed that the causes of the deviation values were: (a) inaccurate planning; (b) a downturn in the spending schedule; (c) the CPCL list was not submitted at once; (d) a delay in negotiations; (e) political assistance; and (f) the DIPA DJA revision was not updated again. Efforts to prevent the occurrence of deviations are: (a) intersectoral coordination with the PPK; (b) applying for purchase permits early in the year; (c) realizing the RPD and increasing the number of SDMs; (d) intercoordination to compile the RDP; (e) improving coordination with the center team; and (f) updating page III of the DIPA on a regular basis.*

Keywords: *fund withdrawal plan, budget realization, performance indicators assessment*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan nilai indikator pada halaman III DIPA dan merumuskan upaya pencegahan terjadinya penyimpangan nilai di Kamar Veteriner Wates. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Instrumen dalam metode wawancara adalah pedoman wawancara terstruktur. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, kemudian dianalisis secara reduksi, dipaparkan, dan ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan penyebab terjadinya penyimpangan nilai adalah: (a) perencanaan yang kurang tepat; (b) adanya penurunan jadwal belanja; (c) daftar CPCL tidak diserahkan sekaligus; (d) adanya keterlambatan negosiasi; (e) adanya bantuan politik; dan (f) revisi DIPA DJA tidak dimutakhirkan kembali. Upaya pencegahan terjadinya penyimpangan adalah: (a) koordinasi lintas sektor dengan PPK; (b) pengajuan izin pengadaan di awal tahun; (c) realisasi RPD dan penambahan jumlah SDM; (d) interkoordinasi penyusunan RDP; (e) peningkatan koordinasi dengan tim pusat; dan (f) pemutakhiran halaman III DIPA secara berkala.*

Kata kunci: *rencana penarikan dana, realisasi anggaran, penilaian indikator kinerja*

PENDAHULUAN

Pengukuran kinerja sektor publik penting dilakukan untuk menilai sejauh mana satuan kerja bisa melaksanakan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai

dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah diterapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah (Risqon, 2012). Salah satu permasalahan pelaksanaan anggaran adalah tingginya

deviasi antara rencana dengan realisasi belanja satuan kerja K/L. Rencana penarikan dana memiliki akurasi tinggi, jika nilai persentase deviasinya lebih rendah atau sama dengan 5%. Akurasi sedang, jika nilai persentase deviasinya diatas 5% sampai dengan 15%. Sedangkan akurasi rendah, jika nilai persentase deviasinya diatas 15% (Luru, 2014).

Perencanaan belanja satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) pengelola dana APBN dituangkan dalam halaman III Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang memuat informasi rencana penarikan dana satuan kerja K/L per jenis belanja dan perkiraan penerimaan dalam satu tahun anggaran yang dirinci dalam dua belas bulan. Rencana penarikan dana tersebut menjadi pedoman satuan kerja dalam merealisasikan belanja dan menjadi sumber data proyeksi perencanaan kas pemerintah. Data historis dan perencanaan kas yang disusun K/L merupakan salah satu unsur pembentuk Laporan Perencanaan Kas Pemerintah Pusat selain perencanaan kas yang berasal dari internal Kementerian Keuangan yaitu Komite *Assets Liabilities Management* (ALM) dan Tim *Cash Planning Information Network* (CPIN) (Sigit, 2019).

Serapan Anggaran pada Balai Besar Veteriner Wates (BBVet Wates) sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi bagian penilaian kinerja

Kementerian Pertanian secara keseluruhan. Satker UPT yang tidak bisa mencapai target serapan anggaran akan mendapat nilai merah dan akan mendapat teguran baik secara lisan maupun tertulis dari Direktorat Jenderal Peternakan dan kesehatan hewan. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran juga dilakukan pada Balai Besar Veteriner Wates dengan menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan BBvet Wates dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja (Renja K/L) dalam satu tahun anggaran serta pembiayaan yang diperlukan untuk menyelesaikannya.

Hasil penilaian evaluasi pada instrumen indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, terdapat deviasi nilai pada indikator halaman III DIPA/indikator rencana penarikan dana Balai Besar Veteriner Wates yang melebihi angka 5% sebagai batas maksimum. Nilai indikator Deviasi Halaman III DIPA tahun 2022 satuan kerja Kantor Balai Besar Veteriner Wates adalah sebesar 26,16 dari skala 100. Dari 12 bulan, terdapat 4 bulan yang memiliki nilai deviasi kurang dari 5%, yaitu bulan Februari, Maret, April, dan September, sedangkan periode lainnya memiliki nilai deviasi lebih dari 5%. Selain itu, penyerapan anggaran di Balai Besar Veteriner Wates juga tidak sesuai dengan rencana dan realisasi yang telah disusun. Hal tersebut dibuktikan dengan rekap data berikut:

Tabel 1. Nilai Indikator Deviasi Halaman III DIPA Tahun 2022

Periode/ Bulan	RPD	Realisasi	% Penyerapan Anggaran	Rata-Rata Indikator Deviasi
Januari	713.037.162	69.570.418	9,76	7,35
Februari	1.107.368.939	17.254.399	1,56	0,85
Maret	2.108.578.962	50.306.362	2,39	1,05
April	2.633.460.257	109.218.207	4,15	2,4
Mei	1.689.786.252	61.630.906	3,65	34,72
Juni	3.310.016.875	1.781.492.064	53,82	66,38
Juli	2.501.877.311	91.965.754	3,68	35,32
Agustus	2.583.590.288	306.349.608	11,86	5,59
September	6.986.671.924	444.370.481	6,36	2,29
Oktober	15.168.982.220	5.716.905.218	37,69	48,03
November	14.215.025.709	5.105.135.556	35,91	48,96
Desember	14.215.025.709	5.105.135.556	35,91	48,96
Rata-Rata				26,15

Sumber: Data Primer Peneliti (2022)

Pelaksanaan kegiatan sesuai rencana akan memberikan kepastian waktu dan jumlah penarikan dana, sehingga perencanaan kas dapat dirumuskan dengan baik. Menurut Herriyanto (2011), pengguna anggaran mengabaikan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA dalam melakukan penarikan dana, sehingga Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) kesulitan mengontrol pengeluaran negara yang bersumber dari realisasi belanja satuan kerja K/L. Idealnya rencana penarikan dana yang telah disusun menjadi pedoman dalam merealisasikan kegiatan. Rendahnya nilai indikator Deviasi Halaman III DIPA menunjukkan bahwa terdapat gap yang tinggi antara rencana penarikan dana dengan realisasi belanja satuan kerja K/L.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk memahami penyebab terjadinya nilai deviasi pada indikator halaman III DIPA/indikator rencana penarikan dana dan merumuskan upaya

mencegah terjadinya nilai deviasi pada indikator halaman III DIPA/indikator rencana penarikan dana pada Balai Besar Veteriner Wates.

KAJIAN PUSTAKA

Rencana Penarikan Dana

Rencana Penarikan Dana (RPD) adalah rencana penarikan kebutuhan dana yang disusun Kuasa Pengguna Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dalam periode tertentu (Rizaldi, 2018). RPD satuan kerja K/L selama satu tahun anggaran yang dirinci dalam 12 bulan dituangkan dalam halaman III DIPA. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, RPD dan Perencanaan Kas, penyusunan RPD Bulanan menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran. Idealnya rencana penarikan dana yang telah disusun menjadi pedoman dalam merealisasikan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan sesuai rencana akan memberikan kepastian waktu dan jumlah penarikan dana,

sehingga perencanaan kas dapat dirumuskan dengan baik. Pengguna Anggaran mengabaikan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA dalam melakukan penarikan dana, sehingga Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) kesulitan mengontrol pengeluaran negara yang bersumber dari realisasi belanja satuan kerja K/L (Herriyanto, 2011).

Anggaran

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2018). Penyerapan dapat diartikan sebagai realisasi dari anggaran. Pengertian anggaran negara meliputi rencana keuangan mendatang yang berisi pendapatan dan belanja, gambaran strategis pemerintah dalam pengalokasian sumber daya untuk pembangunan, sebagai alat pengendalian, instrumen politik serta disusun dalam periode tertentu (Andriani dan Hatta, 2013).

Sebagai kuasa BUN, Direktur Jenderal Perbendaharaan memiliki wewenang melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja. Data dan informasi yang diperlukan termasuk penyerapan dari sisi anggaran, pencapaian output, jumlah tagihan yang telah diselesaikan (seperti yang ditunjukkan dalam dokumen SPM dan SP2D), data tentang kontrak dan pengadaan barang dan jasa, jumlah revisi DIPA, rencana penarikan dana yang ditunjukkan pada halaman III DIPA, pengelolaan rekening pemerintah, pengelolaan UP (uang persediaan) atau

TUP (uang persediaan tambahan), dan Indikator IKPA, yang diperlukan untuk pengawasan dan evaluasi, digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan keuangan (Sya'baniyah, 2020).

Deviasi Halaman III DIPA

Dalam surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-4547/PB.2/2018 tanggal 30 Mei 2018 disebutkan bahwa IKPA telah dikembangkan sebagai ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat dua belas indikator. Salah satu indikator IKPA tahun 2018 adalah Deviasi Halaman III DIPA yang memiliki bobot 5%. Perhitungan indikator Deviasi Halaman III DIPA tahun 2018 berdasarkan rasio rata-rata gap per bulan antara realisasi dengan rencana penarikan dana.

Pada tahun 2019, melalui nota dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor ND-364/PB.2/2019 tanggal 29 Maret 2019, dilakukan reformulasi 4 indikator dari 12 indikator IKPA. Angka deviasi per bulan yang diambil bernilai *absolut*, sehingga dalam perhitungan rata-rata deviasi tidak saling meniadakan. Revisi pemutakhiran halaman III DIPA yang diajukan setelah triwulan berakhir, tidak dapat mempengaruhi nilai deviasi triwulan sebelumnya. Pengaturan penilaian IKPA terbaru mengubah jumlah indikator kinerja semula 12 menjadi 13 indikator.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga menjelaskan mengenai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat IKPA sebagai indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan perencanaan anggaran kualitas anggaran berdasarkan aspek kualitas perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan hasil pelaksanaan anggaran.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk mengungkapkan hasil penelitian dengan menekankan gambaran objektif tentang keadaan sebenarnya pada obyek yang diteliti, sedangkan pendekatan kualitatif merupakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan menggunakan metode alamiah (Sugiyono, 2017).

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Balai Besar Veteriner Wates pada bulan September hingga November 2023.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Ka Subkoordinator Keuangan, Staff Program dan Perencanaan, Kasubkoordinator Evaluasi dan Pelaporan, dan Staff KPPN BBVet Wates. Objek dalam penelitian ini adalah

upaya sinkronisasi RPD dengan realisasi anggaran sesuai Implementasi Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian N/L.

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa hasil wawancara dan sekunder berupa dokumen realisasi anggaran, RPD, IKPA, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data melalui wawancara; observasi dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap kegiatan pelaksanaan anggaran; dan dokumentasi berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

Metode Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktifitas dalam analisis data meliputi kegiatan reduksi data, display data, dan penarik kesimpulan (Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Peneliti menggunakan data dari aplikasi kementerian keuangan terkait penilaian IKPA Satker Balai Besar Veteriner Wates tahun anggaran 2022 berdasarkan Kode KPPN 176, Kode BA 018 dan Kode Satker 239544 sebagai data pendukung observasi terhadap program pelaksanaan anggaran yang telah dijalankan, berikut indikator pelaksanaan anggaran pada tahun 2022:

Tabel 2. Indikator Pelaksanaan Anggaran Satker Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta

Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
Nilai	100	77,01	67,76	97	100	88,27	100	100	89,78	100%	89,78
Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
Nilai Akhir	10	7,7	13,55	9,7	10	8,83	5	25			
Nilai Aspek	88,51		90,61					100			

Sumber: Data Primer Peneliti (2022)

Tabel 2 menunjukkan hasil penilaian evaluasi pada instrumen IKPA Balai Besar Veteriner Wates tahun anggaran 2022 sebesar 89,78 atau berada pada rentan nilai $89 \leq$ dan < 95 , yang berarti BAIK. Nilai tersebut merupakan nilai total dari beberapa indikator

penilaian dengan bobot yang berbeda. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran pada Satker Balai Besar Veteriner Wates ialah Deviasi Halaman III yang diuraikan pada table berikut:

Tabel 3. Detail Indikator Halaman III DIPA Rencana dan Penyerapan RPD Satker BBVET Wates Tahun Anggaran 2022

Periode	Rencana				Penyerapan			
	51	52	53	57	51	52	53	57
'01	397.352.813	315.684.349	-	0	397.352.813	246.113.931	-	0
'02	432.052.622	675.316.317	-	0	432.052.622	658.061.918	-	0
'03	456.878.518	1.601.700.444	50.000.000	0	456.878.391	1.551.394.209	50.000.000	0
'04	844.746.153	1.788.714.104	-	0	862.170.378	1.880.508.086	-	0
'05	445.465.506	1.244.320.746	-	0	445.465.506	1.295.971.652	9.980.000	0
'06	848.675.046	2.461.341.829	-	0	436.860.932	1.215.611.879	123.948.000	0
'07	846.734.129	1.649.116.182	6.027.000	0	859.608.120	1.722.180.945	-	0
'08	435.832.009	2.147.758.279	-	0	449.538.218	1.855.114.880	-	0
'09	435.832.009	6.550.839.915	-	0	436.256.338	6.106.893.763	-	0
10	458.832.009	14.671.119.156	39.031.055	0	433.377.024	9.018.699.978	-	0
11	476.748.009	13.708.472.167	29.805.533	0	425.453.904	18.661.344.731	130.774.420	0
12	476.748.009	13.708.472.167	29.805.533	0	425.453.904	18.661.344.731	130.774.420	0

Sumber: Data Primer Peneliti (2022)

Tabel 3 menunjukkan detail indikator halaman III DIPA bagian kiri yang berisi rencana dan penyerapan dana

pada bulan januari hingga desember tahun 2022, sedangkan tabel indikator halaman III DIPA berisi mengenai

deviasi dan nilai IKPA yang selanjutnya ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4. Detail Indikator Halaman III DIPA Deviasi RPD Tahun Anggaran 2022

Periode	Deviasi				% Deviasi				% Deviasi Seluruh J.Bel	AVG % Deviasi Seluruh J.Bel	% Rata-Rata Deviasi Kumulatif	Nilai IKPA
	51	52	53	57	51	52	53	57				
01	-	69.570.418	-	0	0	22,04	0	0	22,04	7,35	7,35	92,65
02	-	17.254.399	-	0	0	2,56	0	0	2,56	0,85	4,1	100
03	127	50.306.235	-	0	0	3,14	0	0	3,14	1,05	3,08	100
04	17.424.225	91.793.982	-	0	2,06	5,13	0	0	7,19	2,4	2,91	100
05	-	51.650.906	9.980.000	0	0	4,15	100	0	104,15	34,72	9,27	90,73
06	411.814.114	1.245.729.950	123.948.000	0	48,52	50,61	100	0	199,13	66,38	18,79	81,21
07	12.873.991	73.064.763	6.027.000	0	1,52	4,43	100	0	105,95	35,32	21,15	78,85
08	13.706.209	292.643.399	-	0	3,14	13,63	0	0	16,77	5,59	19,21	80,79
09	424.329	443.946.152	-	0	0,1	6,78	0	0	6,88	2,29	17,33	82,67
10	25.454.985	5.652.419.178	39.031.055	0	5,55	38,53	100	0	144,08	48,03	20,4	79,6
11	51.294.105	4.952.872.564	100.968.887	0	10,76	36,13	100	0	146,89	48,96	22,99	77,01
12	51.294.105	4.952.872.564	100.968.887	0	10,76	36,13	100	0	146,89	48,96	22,99	77,01

Sumber: Data Primer Peneliti (2022)

Pada tabel 4 terlihat deviasi nilai pada indikator halaman III DIPA/indikator rencana penarikan dana Balai Besar Veteriner Wates yang melebihi angka 5% sebagai batas maksimum. Perolehan nilai deviasi tertinggi sebesar 66,38 pada periode 6 atau bulan Juni, nilai deviasi sebesar 48,96 pada periode 11 dan 12, yaitu bulan November dan Desember, nilai deviasi sebesar 48,03 pada periode 10 atau bulan Oktober, nilai deviasi 35,32 pada periode 7 atau Juli, dan nilai deviasi sebesar 34,72 pada periode 5 atau Bulan Mei.

Di Balai Besar Veteriner Wates, Deviasi Halaman III DIPA beberapa tahun ini muncul sebagai indikator yang tak mencapai target. Meskipun hanya sebagai salah satu dari delapan indikator yang menjadi unsur penilaian IKPA oleh Kementerian Keuangan dan hanya menyumbangkan 10% dari total nilai 100, dan dibandingkan dengan indikator

lainnya, namun Deviasi Halaman III DIPA di BBVet Wates merupakan faktor penentu dalam Total Nilai IKPA, baik bulanan maupun tahunan. Hal ini dikerenakan untuk indikator-indikator lainnya seperti revisi DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan dan lain lain sampai dengan indikator capaian *output* telah tercapai secara maksimal.

Pembahasan

Penyebab Terjadinya Nilai Deviasi pada Indikator Halaman III DIPA di Balai Besar Veteriner Wates

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan adanya nilai deviasi pada indikator halaman III DIPA/indikator rencana penarikan dana Balai Besar Veteriner Wates yang melebihi angka 5% sebagai batas maksimum. Hanya terdapat empat periode dalam satu tahun 2022 yang nilai devasinya kurang dari 5%, yaitu bulan Februari, Maret, April, dan

September. Selebihnya, terdapat deviasi lebih dari 5% pada setiap periodenya. Nilai deviasi tertinggi sebesar 66,38% ditemukan pada periode 6 atau bulan Juni, nilai deviasi sebesar 48,96% pada periode 11 dan 12, yaitu bulan November dan Desember, nilai deviasi sebesar 48,03% pada periode 10 atau bulan Oktober, nilai deviasi 35,32% pada periode 7 atau Juli, dan nilai deviasi sebesar 34,72% pada periode 5 atau Bulan Mei.

Penelitian Ratnasari (2022) juga menemukan adanya deviasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, dimana deviasi tinggi terjadi pada bulan Maret, April, Mei, September, Oktober, November, dan Desember 2019. Pada tahun 2020, deviasi tinggi terjadi pada bulan Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, dan Oktober 2020. Pada tahun 2021, deviasi yang tinggi terjadi pada bulan September, Oktober, dan November 2021. Penelitian tersebut menemukan tiga faktor penyebab tingginya deviasi, yaitu perencanaan anggaran yang belum ideal, koordinasi internal antar bagian yang lemah, dan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia.

Hasil wawancara menunjukkan beberapa penyebab terjadinya deviasi nilai RPD di IKPA BBVet Wates:

1. Faktor pertama, adanya perencanaan yang tidak akurat

Terdapat beberapa kegiatan yang sudah dicantumkan dalam halaman III DIPA/indikator rencana penarikan dana tidak dilaksanakan sesuai rencana atau pelaksanaannya

menyimpang dari perencanaan, sehingga mengakibatkan deviasi lebih dari 5%. Pada saat penyusunan anggaran, tim perencanaan melakukan prediksi pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada tahun berikutnya, dalam realisasinya ada perbedaan rencana dan realisasi pelaksanaan anggaran sehingga menyebabkan deviasi.

Proyeksi pelaksanaan kegiatan belum memedomani rancangan pelaksanaan kegiatan yang disusun TOR kegiatan, hal ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan dan realisasi keuangan berbeda dengan rencana awal di TOR, beberapa pelaksana kegiatan cenderung menunda pelaksanaan kegiatan.

2. Faktor kedua, adanya kemunduran jadwal belanja dari jadwal yang sudah ditentukan

Realisasi belanja bahan seringkali mengalami kemunduran dari bulan yang sudah dijadwalkan terkait dengan aturan TKDN yang harus meminta ijin ke menteri pertanian. Terdapat ketidakpastian dalam belanja kontraktual, yang dikontrakkan dalam jangka waktu panjang (diatas 6 bulan), terutama untuk selesai pekerjaan pada pembelian bahan pengujian sehingga tim perencana kesulitan untuk memperkirakan pada bulan apa akan dilakukan pembayaran. Adanya kegiatan-kegiatan yang pelaksanaannya mundur dari jadwal juga disebabkan karena keterbatasan jumlah SDM

3. Faktor ketiga, *list* CPCL tidak disampaikan secara serempak

Pihak BBVet Wates seringkali dibuat menunggu daftar Calon Penerima dan Calon Lokasi terkumpul dengan lengkap baru dilakukan tindak lanjut penyaluran bantuan kepada kelompok penerima. Sejauh ini, penyampaian daftar CPCL tidak dilakukan secara serempak sehingga menyebabkan distribusi BANPEM mengalami kemunduran dari jadwal yang sudah dibuat.

4. Faktor keempat, adanya keterlambatan juknis

Keterlambatan juknis kegiatan dari eselon I mengakibatkan kegiatan tidak sesuai dengan rencana pada halaman III DIPA/indikator rencana penarikan dana. Menurut Alvaro dan Riyono (2020), juknis masih menjadi permasalahan tahunan pada implementasi DAK dalam kurun waktu 2003 hingga 2011. Sama halnya Aprijon (2019) juga menyatakan bahwa penyerapan DAK Fisik terhambat dikarenakan juknis terlambat terbit, dan permasalahan ini selalu berulang hingga kini.

5. Faktor kelima, penetapan bantuan yang bersifat politis atau bergantung pada faktor eksternal

Penetapan bantuan pemerintah yang bersifat politis mengakibatkan satgas harus menunggu persetujuan dari DPR untuk meninjau pelaksanaan kegiatan lebih lanjut. Selain itu, terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran besar yang dalam pelaksanaannya tergantung dari faktor

eksternal, misalnya kegiatan di 1785 Pengembangan Bibit dan Produksi Ternak, yang pelaksanaannya tergantung oleh Direktorat Perbibitan dan Produksi.

6. Faktor keenam, revisi DIPA DJA/ Eselon I yang mengembalikan RPD halaman III DIPA pada keadaan DIPA awal yang tidak dimutakhirkan kembali, sehingga menyebabkan perbedaan rencana anggaran.

Hasil diatas menunjukkan adanya deviasi sebagian besar disebabkan karena faktor SDM. Sesuai penelitian (Arnida, 2022) tingkat deviasi Halaman III DIPA atau indikator rencana penarikan dana dipengaruhi oleh masalah sumber daya manusia dan sarana prasarana, masalah kebijakan realokasi/ administrasi, dan masalah pelaksanaan kegiatan.

Upaya Mencegah Terjadinya Nilai Deviasi pada Indikator Halaman III DIPA di Balai Besar Veteriner Wates

BUN menyediakan kas setiap bulan menggunakan data RPD yang ditemukan di halaman III DIPA. Untuk memastikan bahwa BUN memberikan jumlah kas yang diperlukan secara akurat, sangat penting bahwa datanya akurat. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) membuat metrik untuk mengevaluasi ketepatan data RPD halaman III DIPA dibandingkan dengan realisasi anggarannya karena peran penting RPD dalam pengelolaan kas (Suprianto, 2022).

Sebagai salah satu dari delapan indikator yang menjadi unsur penilaian IKPA dan hanya menyumbangkan 10%

dari total nilai 100, namun Deviasi Halaman III DIPA merupakan faktor yang cukup menjadi penentu (PTA Bandar Lampung, 2023). Meskipun RPD halaman III DIPA sudah menjelaskan dan menentukan prosentase penetapan anggaran pada masing-masing sisi, nyatanya masih banyak ditemukan deviasi yang nilainya sangat tinggi, jauh diatas 5%. Upaya mencegah terjadinya nilai deviasi pada indikator halaman III DIPA di Balai Besar Veteriner Wates ialah sebagai berikut:

a. Faktor pertama

Diperlukan adanya koordinasi antar bidang baik bidang perencanaan atau kegiatan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui rewiuw Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) atau menjadwalkan kembali setiap minggu kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menyesuaikan halaman III DIPA. Penelitian Arnida (2022) menemukan bahwa masalah pelaksanaan kegiatan lebih berkaitan dengan koordinasi satker internal dan eksternal dalam penyusunan RPD.

b. Faktor kedua

Satgas diharapkan untuk merealisasikan RPD yang paling mendekati rencana realisasi pada saat penyusunan anggaran dilakukan. Sementara itu, mundurnya kegiatan-kegiatan dari jadwal yang disebabkan karena keterbatasan SDM perlu mendapat tindaklanjut secepatnya dalam menambah jumlah SDM yang kompeten sesuai kebutuhan.

Upaya mencegah deviasi dengan melakukan Revisi Kanwil untuk perbaikan RPD bulanan yang disesuaikan dengan realisasi pembayaran (SP2D) setiap awal triwulan sebelum tanggal 10, memastikan dilaksanakannya ketentuan mengenai pembayaran gaji, tunjangan, honorarium, belanja langganan, mengingat pada komponen gaji terdapat unsur gaji ketigabelas dan keempat belas, serta adanya gaji dan tunjangan diajukan dua kali pada bulan Desember.

c. Faktor ketiga,

Peran pemimpin untuk mengevaluasi dan meningkatkan motivasi kerja satgas agar bersedia melengkapi dokumen atau *list* CPCL tepat waktu, sehingga pelaksanaan BANPEM berjalan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Menurut (Yusup dan Yuniarti, 2022) kemampuan dan keahlian akan tidak berguna jika tidak diikuti oleh moral kerja dan kedisiplinan pegawai untuk mencapai tujuan kinerja yang tinggi. Peranan seorang pemimpin termasuk mendorong, mengarahkan, dan mengawasi bawahannya.

d. Faktor keempat

Diperlukan koordinasi yang aktif antara bidang perencanaan, pelaksana kegiatan, dan keuangan untuk menyusun RPD dengan memprioritaskan kegiatan rutin dan kegiatan-kegiatan yang sudah memiliki juknis, mengingat beberapa kegiatan yang sudah direncanakan

kadang pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang disusun.

e. Faktor kelima

Meningkatkan koordinasi dengan tim pusat terutama kegiatan yang dipengaruhi faktor eksternal sehingga dapat lebih tepat memperkirakan pelaksanaan kegiatan untuk memprediksi Rencana Penarikan Dana (terutama untuk kegiatan Bantuan Pemerintah Hewan Ternak).

f. Faktor keenam

Diperlukan *update* halaman III DIPA secara berkala setiap triwulan dan memastikan deviasi antara pelaksanaan dan perencanaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA tidak lebih dari 5%. Upaya lain dengan mensosialisasikan kepada tim BBVet Wates mengenai nilai IKPA sebagai parameter pengukur keberhasilan, sehingga baik tim perencanaan, keuangan, pengadaan maupun tim pelaksana kegiatan dapat lebih intens dan konsisten dalam penganggaran dan pelaksanaan kegiatan.

Mengajukan usulan kepada tim keuangan eselon satu untuk dapat meningkatkan perhatian dan menentukan target nilai IKPA kepada seluruh satker, sehingga bukan hanya nilai Serapan Anggaran yang menjadi perhatian penting bagi satker. Seperti halnya yang tertuang dalam laporan Kementerian Keuangan RI Kanwil DJob DII (2024) bahwa tantangan strategis pada deviasi halaman III DIPA diantaranya adalah belum

menyusun rencana kegiatan dan proyeksi pencairan secara akurat dan koordinasi penjadwalan revisi anggaran terpusat belum optimal. Oleh karenanya, setiap Lembaga.

Mendukung hasil diatas, laporan Kementerian Kesehatan RI pada Kantor kesehatan Pelabuhan Cilacap (2022), dalam Rencana Aksi Kegiatan periode 2020–2024 juga disebutkan beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai nilai indikator kerja pelaksanaan anggaran dilakukan dengan strategi berikut:

- a. Koordinasi dengan lintas program selaku pelaksana anggaran tentang RPK dan RPD
- b. Koordinasi dengan pejabat pengadaan barang/jasa tentang RUP
- c. Input data penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, capaian output setiap hari dalam aplikasi ON SPAN
- d. Melakukan revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA
- e. Pencatatan dan pelaporan pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM
- f. Peningkatan kapasitas SDM/ petugas pengelola anggaran

KETERBATASAN PENELITIAN

Peran pimpinan satker dalam meningkatkan motivasi kerja petugas penyusun anggaran untuk memperhatikan isi kebenaran dokumen RKA-KL yang menjadi pedoman dokumen DIPA sehingga dapat menekan tingkat kesalahan dokumen yang mengakibatkan terjadinya revisi DIPA yang dapat mempengaruhi tingkat penyerapan

anggaran. Penelitian ini hanya menggunakan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 sebagai acuan dalam melaksanakan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan evaluasi penilaian kinerja pelaksanaan anggaran dengan metode lain, di lembaga lain dan menggunakan teknik analisa lain yang berbeda untuk mengetahui implementasi penilaian kinerja anggaran di berbagai lingkup.

SIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1). Penyebab terjadinya nilai deviasi pada indikator halaman III DIPA/indikator rencana penarikan dana di Balai Besar Veteriner Wates adalah: a) adanya perencanaan yang tidak akurat, b) kemunduran jadwal belanja dari jadwal yang sudah ditentukan, c) *list* CPCL tidak disampaikan secara serempak, d) adanya keterlambatan juknis, e) penetapan bantuan yang bersifat politis dan bergantung pada faktor eksternal, dan f)

revisi DIPA DJA yang mengembalikan RPD tidak dimutakhirkan kembali; 2). Upaya mencegah terjadinya nilai deviasi pada indikator halaman III DIPA/indikator rencana penarikan dana di Balai Besar Veteriner Wates adalah: a) koordinasi antar bidang dengan PPK melalui review POK dan menjadwalkan kembali kegiatan yang akan dilaksanakan, b) mengajukan izin pembelian diawal tahun, merealisasikan RPD yang paling mendekati rencana, dan menambah jumlah SDM, c) peran pemimpin untuk mengevaluasi dan meningkatkan motivasi kerja, d) koordinasi antara bidang perencanaan, pelaksana kegiatan, dan keuangan untuk menyusun RPD dengan memprioritaskan kegiatan rutin yang sudah memiliki juknis, e) meningkatkan koordinasi dengan tim pusat sehingga dapat lebih tepat memperkirakan pelaksanaan kegiatan untuk memprediksi RPD, dan f) diperlukan *update* halaman III DIPA secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvaro, R. and Riyono, T. (2020) 'Dampak Keterlambatan Petunjuk Teknis K/L Terhadap Penyerapan DAK Fisik', *Buletin APBN*, 5(4).
- Andriani, W. and Hatta, E. (2013) 'Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Pusat (Studi pada Politeknik Negeri Padang)', *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 7(2).

- Arnida, A. (2022) 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Deviasi Halaman III DIPA pada Satker Lingkup Kemenag Bangka Belitung', *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(1).
- Herriyanto, H. (2011) 'Faktor-faktor Utama yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga', *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 7(1).
- Luru, P. (2014) 'Mekanisme Perkiraan Pencairan Dana dan Tingkat Realisasi Anggaran pada KPPN Poso', *Jurnal Ilmiah Ekomen*, 14(2).
- Mardiasmo (2018) *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. Yogyakarta: ANDI.
- PTA Bandar Lampung (2023) 'Deviasi Halaman III DIPA, Indikator Penting Bagi Kualitas Pelaksanaan Anggaran Satker. Mahkamah Agung RI'. Available at: <https://pta-bandarlampung.go.id/berita-seputar-peradilan/951-deviasi-halaman-iii-dipa-indikator-penting-bagi-kualitas-pelaksanaan-anggaran-satker.html> (Accessed: 25 January 2024).
- Ratnasari, D. (2022) 'Menilik Penyebab Deviasi antara Rencana dengan Realisasi Belanja Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga: Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro', *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 11(2).
- Risqon, D.P. (2012) 'Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, dan Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan', *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, 13(1).
- Rizaldi, M. (2018) 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Efektivitas Perencanaan Kas Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga di Wilayah Kerja KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu', *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 31.
- Sigit, A. (2019) 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Akurasi Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian Satuan Kerja Kementerian/Lembaga', *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 4(2).
- Sugiyono (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprianto, E. (2022) 'Optimalisasi Nilai Indikator Deviasi Halaman III DIPA dalam IKPA', *BangkaPos.com*. Available at: <https://bangka.tribunnews.com/2022/11/21/optimalisasi-nilai-indikator-deviasi-halaman-iii-dipa-dalam-ikpa> (Accessed: 23 January 2024).
- Sya'baniyah, N. (2020) *Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pada Satuan Kerja Balai Besar Rehabilitasi Bnnlido Bogor*. Doctoral dissertation. Universitas Djuanda.

Wirawan (2011) *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Yusup, A. and Yuniarti, R. (2022) 'Peran Pimpinan dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan', *Jurnal Mentari Publika*(3), p. 1.